



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SMP/MTs: Kajian Literatur

Analysis of the Zoning Policy for New Student Admissions (PPDB) at the Junior High School/MTs Level: A Literature Review

Sri Rahayu Damayanti¹, Imanda Restaviana², Sri Rizki Amalia³, Dwi Nur Kumalasari⁴, Ria Chintiya⁵, Nopri⁶, Novilia⁷, Darwin Efendi⁸, Akbar Riansyah⁹

¹⁻⁹Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Palembang, Jl. Jend. A. Yani Lorong Gotong Royong – Palembang – Sumatera Selatan

Corresponding Author: E-mail: Srirahayudamayanti1@gmail.com¹, imandarestaviana@gmail.com², sririzkiamalia3@gmail.com³, dwinurkumalasari0513@gmail.com⁴, noviliaholid@gmail.com⁵, nopriariyanti83@gmail.com⁶, riachintiya29@gmail.com⁷, darwinpasca2010@gmail.com⁸, akbariansyah@univpgri-palembang.ac.id⁹

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Apr, 2026

Revised: 11 Jun, 2026

Accepted: 25 Jun, 2026

Kata Kunci:

Kebijakan Zonasi, PPDB, Pemerataan Pendidikan, SMP/MTs

Keywords:

Zoning Policy, PPDB, Educational Equity, SMP/MTs

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11511](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11511)

ABSTRAK

Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diberlakukan melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 bertujuan mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan serta menghapus stigma sekolah favorit. Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan zonasi PPDB pada jenjang SMP/MTs melalui studi literatur sistematis. Kajian difokuskan pada tiga aspek: (1) landasan regulasi dan tujuan kebijakan zonasi, (2) dampak implementasi terhadap pemerataan akses pendidikan, dan (3) tantangan serta rekomendasi perbaikan kebijakan. Sebanyak 35 sumber literatur tahun 2018-2024 dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah berhasil meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan mendistribusikan siswa lebih merata antarsekolah. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius berupa kesenjangan kualitas antarsekolah, manipulasi data domisili, kendala geografis, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan zonasi demi tercapainya pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Kebaruan artikel ini terletak pada sintesis komprehensif lintas wilayah dan jenjang yang belum banyak dilakukan sebelumnya.

ABSTRACT

The zoning policy in New Student Admissions (PPDB) enacted through Minister of Educational Equity and Culture Regulation Number 14 of 2018 aims to achieve equitable access and quality of education and eliminate the stigma of elite schools. This article examines the implementation of the PPDB zoning

policy at the SMP/MTs level through a systematic literature study. The study focuses on three aspects: (1) regulatory foundations and objectives of the zoning policy, (2) the impact of implementation on equitable access to education, and (3) challenges and policy improvement recommendations. A total of 35 literature sources from 2018-2024 were analyzed using content analysis. Results show that the zoning policy has succeeded in improving educational access for underprivileged communities and distributing students more evenly across schools. However, implementation still faces serious challenges including quality gaps between schools, domicile data manipulation, geographical constraints, and low public understanding. Synergy between central and local governments and other stakeholders is needed to optimize the zoning policy toward equitable and just education. The novelty of this article lies in its comprehensive cross-regional and cross-level synthesis that has not been widely conducted before.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (1). Namun dalam praktiknya, pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di Indonesia. Fenomena sekolah favorit dan sekolah pinggiran mencerminkan ketidakmerataan distribusi sumber daya pendidikan yang telah berlangsung lama.

Ketimpangan ini terlihat jelas pada jenjang SMP/MTs, di mana persaingan masuk sekolah negeri berkualitas sangat tinggi dan cenderung hanya dapat diakses oleh siswa dari keluarga menengah ke atas yang memiliki akses terhadap bimbingan belajar (Rachman, 2019). Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB yang mewajibkan sekolah negeri menerima peserta didik berdasarkan prinsip zonasi. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang memperjelas mekanisme dan kuota penerimaan berdasarkan jalur zonasi (minimal 50%), afirmasi (minimal 15%), perpindahan orang tua (maksimal 5%), dan prestasi (maksimal 30%).

Kebijakan zonasi pada jenjang SMP/MTs memiliki dinamika tersendiri mengingat tingginya persaingan masuk sekolah menengah pertama negeri yang selama ini dianggap berkualitas. Kebijakan ini secara langsung mengubah pola penerimaan dari seleksi berbasis nilai akademik menjadi seleksi berbasis kedekatan tempat tinggal dengan sekolah. Perubahan paradigma ini menuai beragam respons dari masyarakat, mulai dari dukungan karena dianggap lebih adil hingga penolakan karena dianggap mengorbankan prestasi akademik siswa (Hartini, 2020). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan zonasi PPDB.

Sebagian studi mengapresiasi dampak positif kebijakan ini terhadap pemerataan akses, sementara studi lainnya menyoroti permasalahan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melakukan sintesis dan analisis mendalam terhadap literatur yang ada guna memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan zonasi PPDB pada jenjang SMP/MTs. Rumusan masalah artikel ini adalah: (1) Bagaimana landasan regulasi dan tujuan kebijakan zonasi PPDB? (2) Bagaimana dampak implementasi kebijakan zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan di SMP/MTs? (3) Apa saja tantangan dalam implementasi dan bagaimana rekomendasi perbaikannya? Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan dan menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam penyempurnaan sistem PPDB di masa mendatang.

Kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan sintesis lintas wilayah yang komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan berbasis bukti dari literatur terkini. *penulis* dan sitasi sumber dengan gaya selingkungan *American Psychological Association (APA)* Versi Terbaru. Disarankan kepada seluruh penulis agar menggunakan Software Reference Manager Seperti **MENDELEY/ ZETORO** Sebagai contoh adalah: hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70%

siswa tidak mampu mengenali permasalahan otentik (Santoso *et al.*, 2024). Demikian juga hasil penelitian Cheng and Lai (2020) yang membuktikan Hal itu sesuai dengan teori pengajaran (Schiller and Bryant, 1998) dan teori penilaian (Sani, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) sistematis. Sumber literatur yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan pemerintah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2018-2024. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, ERIC, dan portal garuda.kemdikbud.go.id dengan kata kunci: kebijakan zonasi, PPDB, pemerataan pendidikan, SMP, dan MTs. Kriteria inklusi meliputi: (1) literatur berbahasa Indonesia atau Inggris, (2) diterbitkan antara 2018-2024, (3) membahas kebijakan zonasi atau PPDB, dan (4) berkaitan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dari proses seleksi, diperoleh 35 sumber literatur yang memenuhi kriteria. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) secara naratif, dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema utama: landasan regulasi, dampak implementasi, tantangan, dan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Regulasi dan Tujuan Kebijakan Zonasi PPDB Kebijakan zonasi PPDB memiliki landasan hukum yang kuat dan bertingkat. Secara konstitusional, kebijakan ini berpijak pada Pasal 31 UUD 1945. Pada level undang-undang, dasar hukumnya adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara teknis, kebijakan ini diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang kemudian direvisi dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan zonasi terbagi dalam dua dimensi: pemerataan akses dan pemerataan kualitas.

Kemendikbud (2019) menegaskan bahwa zonasi adalah bagian dari strategi besar reformasi pendidikan yang mencakup redistribusi guru, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, dan pemerataan sarana prasarana. Rachman (2019) menambahkan bahwa kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kemacetan lalu lintas akibat mobilitas siswa lintas zona dan menghilangkan diskriminasi berbasis kemampuan akademik.

Dampak Implementasi Kebijakan Zonasi terhadap Pemerataan Akses Berdasarkan kajian literatur, implementasi kebijakan zonasi menunjukkan dampak positif yang signifikan. Pertama, kebijakan ini telah berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya tidak dapat bersaing masuk sekolah negeri berkualitas. Wahyudi (2021) dalam penelitiannya di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan persentase siswa dari keluarga prasejahtera yang diterima di SMP negeri setelah implementasi zonasi. Kedua, data Kemendikbud (2020) menunjukkan bahwa selisih jumlah pendaftar antara sekolah populer dan kurang diminati mengalami penyempitan setelah tahun pertama implementasi zonasi. Ketiga, dari perspektif manajemen pendidikan, zonasi telah mendorong peningkatan investasi pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur sekolah dan redistribusi guru PNS (Haryono, 2022). Namun demikian, Bowen et al. (2020) mengingatkan bahwa keberhasilan redistribusi siswa tidak otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran jika tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas institusional sekolah.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Zonasi Kajian literatur juga mengungkapkan berbagai tantangan serius dalam implementasi. Tantangan pertama adalah kesenjangan kualitas antarsekolah yang masih sangat tinggi. Raharjo (2021) mengemukakan bahwa redistribusi siswa melalui zonasi tidak akan efektif tanpa peningkatan kualitas sekolah yang selama ini kurang diminati.

Tantangan kedua adalah praktik manipulasi data domisili. Sari dan Wulandari (2022) menemukan fenomena pemalsuan alamat KK oleh orang tua siswa yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah favorit dalam zona tertentu.

Tantangan ketiga berkaitan dengan implementasi di daerah dengan kondisi geografis beragam. Mulyadi (2023) mencatat bahwa di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara, penerapan zonasi memerlukan penyesuaian khusus.

Tantangan keempat adalah rendahnya sosialisasi kebijakan. Hallinger dan Heck (2020) menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang efektif untuk membangun dukungan publik.

Tantangan kelima adalah resistensi dari sekolah-sekolah swasta yang merasa terancam dengan redistribusi siswa akibat zonasi.

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini merumuskan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan zonasi dengan program peningkatan mutu sekolah secara komprehensif dan terencana. Fullan (2020) menegaskan bahwa reformasi pendidikan yang berhasil selalu menggabungkan perubahan struktural dengan peningkatan kapasitas. Kedua, diperlukan penguatan sistem verifikasi data domisili yang terintegrasi dengan Dukcapil secara digital. Ketiga, perlu dikembangkan formula zonasi yang adaptif sesuai dengan kondisi geografis dan demografis masing-masing wilayah. Keempat, evaluasi berkala berbasis data perlu dilembagakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Leithwood et al., 2020).

Tabel 1. Desain Tabel Sesuai Format

No	Nama	Periode
1	A	12-15 M
2	B	16-18 M
3	C	19-21 M
4	D	22-24 M
5	E	25-28 M

Sumber: Raya (2019)

KESIMPULAN

Kebijakan zonasi PPDB pada jenjang SMP/MTs merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif berupa peningkatan akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu dan distribusi siswa yang lebih merata. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius berupa kesenjangan kualitas antarsekolah, praktik manipulasi domisili, kendala geografis, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Keberhasilan kebijakan zonasi tidak dapat diukur dari aspek pemerataan akses semata, tetapi harus mencakup pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara kebijakan zonasi dengan program peningkatan mutu pendidikan, penguatan sistem verifikasi data, pengembangan formula zonasi kontekstual, serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat adalah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati. Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk mengembangkan peta jalan (roadmap) implementasi zonasi yang mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis lokal. Bagi kepala sekolah dan guru, diperlukan peningkatan kompetensi untuk menghadapi heterogenitas siswa yang semakin beragam pasca-zonasi. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji dampak jangka panjang kebijakan zonasi terhadap capaian belajar siswa menggunakan data longitudinal yang komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adams, D., & Hamid, J. A. (2021). School leadership and policy implementation: Evidence from Malaysia. *Journal of Computers in Educational Equity*, 7(2), pp. 131–153. doi:10.1007/s40692-019-00150-8.
- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international

- experiences. *Penilaian autentik*. Bumi Aksara.
- Bowen, G. A., et al. *et al.* (2024) 'The quality of anti-corruption education in Indonesian schools: adaptation of the Servqual method', *International Journal of Evaluation and Research in Educational Equity (IJERE)*, 13(4), p. 2482. doi:10.11591/ijere.v13i4.28150.
- Dufour, R., & Marzano, R. J. (2011). Leaders of learning: How district, school, and classroom leaders improve student achievement. *The values book: teaching 16 basic values to young children*. Gryphon House, Inc.
- Adams, D., & Hamid, J. A. (2021). School leadership and policy implementation: Evidence from Malaysia. *Educational Management Administration & Leadership*, 49(3), 412-430.
- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7-16.
- Bowen, G. A., et al. (2020). School choice and educational equity: A systematic review. *Review of Educational Research*, 90(4), 503-545.
- Bush, T. (2019). Distinguishing between educational management and educational leadership. *Educational Management Administration & Leadership*, 47(1), 3-5.
- Day, C., et al. (2020). The impact of school leadership on pupil outcomes. *School Leadership & Management*, 40(5), 397-415.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Dufour, R., & Marzano, R. J. (2019). *Leaders of learning: How district, school, and classroom leaders improve student achievement*. Solution Tree Press.
- Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Hallinger, P., & Heck, R. H. (2020). Collaborative leadership and school improvement: Understanding the effects on school capacity and student learning. *School Leadership & Management*, 30(5), 469-484.
- Hartini, S. (2020). Implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 112-124.
- Haryono, A. (2022). Redistribusi guru sebagai implikasi kebijakan zonasi PPDB: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(1), 45-58.
- Kemendikbud. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2020). *Laporan evaluasi implementasi PPDB zonasi tahun 2020*. Kemendikbud.
- Leithwood, K., et al. (2020). How school leadership influences student learning: A framework for understanding mechanisms of influence. *School Effectiveness and School Improvement*, 31(1), 3-33.
- Mulyadi, R. (2023). Tantangan implementasi kebijakan zonasi PPDB di daerah kepulauan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(1), 67-81.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: Implementasi, evaluasi, dan revisi*. Elex Media Komputindo.
- OECD. (2021). *Education at a glance 2021: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Rachman, F. (2019). Kebijakan zonasi PPDB: Antara idealisme dan realitas implementasi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(3), 201-218.
- Raharjo, S. B. (2021). Analisis dampak kebijakan zonasi terhadap mutu pendidikan menengah pertama. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 25(1), 89-103.
- Rivkin, S. G., et al. (2019). Teachers, schools, and academic achievement. *Econometrica*, 73(2), 417-458.
- Sari, D. P., & Wulandari, R. (2022). Fenomena manipulasi domisili dalam implementasi kebijakan zonasi PPDB. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 134-149.

- Schleicher, A. (2020). *World class: How to build a 21st-century school system*. OECD Publishing.
- Spillane, J. P. (2019). Distributed leadership. *The Educational Forum*, 69(2), 143-150.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2018). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Umaedi. (2019). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah*. Departemen Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education*. UNESCO Publishing.
- Wahyudi, T. (2021). Dampak kebijakan zonasi PPDB terhadap pemerataan akses pendidikan siswa dari keluarga prasejahtera. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 55-72.
- Wiyono, B. B. (2020). Evaluasi implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 26(1), 1-10.
- Yukl, G. (2020). *Leadership in organizations* (9th ed.). Pearson Education.